

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menghindari adanya tumpang tindih pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Provinsi Kalimantan Selatan dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta hasil Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RAKORWASDA) dan hasil Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nasional (RAKORWASDANAS) Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2016;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 92);
28. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 31);
29. Peraturan Gubernur Nomor 075 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
5. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektur Jenderal Kementerian lainnya.
6. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
7. Inspektur Provinsi adalah Pimpinan Institusi/Instansi Pengawasan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Inspektorat Provinsi adalah Instansi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Daerah Kalimantan Selatan.
9. Inspektur Kabupaten/Kota adalah Pimpinan Institusi/Instansi Pengawasan Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.
10. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah Instansi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.
11. SKPD adalah Perangkat Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
12. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana kerja pengawasan tahunan yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan kebijakan pengawasan yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

BAB II
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2016

Pasal 2

- (1) PKPT disusun dan ditetapkan terdiri atas sasaran dan arah kebijakan pengawasan serta objek pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota serta objek pemeriksaan terhadap program nasional yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan Menteri yang ditetapkan setiap tahun.
- (2) PKPT selain didasarkan arah kebijakan pengawasan dari Menteri, juga berdasarkan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rakorwasda) dan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nasional (Rakorwasdanas) yang dilaksanakan setiap tahun antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Daerah dan Pusat, yang dilaksanakan berpegang sesuai dengan kesepakatan bersama (antara Inspektorat Kabupaten/Kota dengan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian).
- (3) Sasaran dan arah kebijakan serta objek pemeriksaan Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: pemeriksaan berkala (*reguler*), pemeriksaan/reviu pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015, Evaluasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendampingan Penutupan Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Evaluasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota harus mengacu pada PKPT Tahun 2016 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (5) PKPT yang ditetapkan sebagaimana yang tertuang dalam peta pengawasan terlampir.

Pasal 3

Objek Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Januari 2016

PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 1

PETA PENGAWASAN
ITPROV, ITJEN KEMENTERIAN, ITKAB/KO
TAHUN 2016
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2016

NO.	OBJEK PEMERIKSAAN APFP	JADWAL OPERASIONAL PEMERIKSAAN TAHUN 2016												KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
I	<u>SEKRETARIAT DAERAH</u>													
1	<u>SEKRETARIAT DAERAH</u>													
	a. BIRO PEMERINTAHAN											X4		A Itjen Kementerian Dalam Negeri
	b. BIRO HUKUM													B Itjen Kementerian Dikbud
	c. BIRO ORGANISASI										X4			C Itjen Kementerian Pertanian
	d. BIRO PEREKONOMIAN			X2										D Itjen Kementerian Keh. dan Lingk. Hidup
	e. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT			X2										E Itjen Kementerian Ketenagakerjaan
	f. BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT				X2									F Itjen Kementerian Koperasi dan UKM
	g. BIRO UMUM			X3										G Itjen Kementerian Pemuda dan Olahraga
	h. BIRO PERLENGKAPAN				X3									H Itjen Kementerian Pemberd. Peremp. dan Pelindungan dan Anak
	i. BIRO KEUANGAN										X1			
II	<u>DEWAN PERWAKILAN RAKYAR DAERAH</u>													
2	SEKRETARIAT DPRD								X4					
III	<u>KANTOR</u>													
3	KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI								X4					
4	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										X1			
IV	<u>DINAS-DINAS DAERAH</u>													
5	DINAS PENDIDIKAN						X2							X Inspektorat Prov
6	DINAS KESEHATAN								X3					X1 Inspektorat Prov. Wilayah 1
7	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMASI						X3							X2 Inspektorat Prov. Wilayah 2
8	DINAS PEKERJAAN UMUM						X1							X3 Inspektorat Prov. Wilayah 3
9	DINAS SOSIAL						X4							X4 Inspektorat Prov. Wilayah 4
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						X1							
11	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN								X2					
12	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							X2						
13	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, BUDPAR							X1						
14	DINAS KEHUTANAN						X3							
15	DINAS PERKEBUNAN								X3					
16	DINAS PETERNAKAN									X2				
17	DINAS PERTANIAN TP DAN HORTIKULTURA								X1					

NO.	OBJEK PEMERIKSAAN APFP	JADWAL OPERASIONAL PEMERIKSAAN TAHUN 2016												KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
47	EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMDA KAB/KO							X2						
48	EVALUASI SAKIP KAB/KO									X4				
X	INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN													
49	KEMENTERIAN DALAM NEGERI									A				
50	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		B	B	B	B	B			B	B	B	B	
51	KEMENTERIAN PERTANIAN						C					C		
52	KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP											D		
54	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN					E								
55	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL & MENEGANGAH					F	F							
56	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA								G					
57	KEMENTERIAN PEMBERD. PEREMP. DAN PELIND. ANAK			H										
XI	KABUPATEN/KOTA													
58	KOTA BANJARMASIN				X1									
59	KOTA BANJARBARU					X1								
60	KABUPATEN BANJAR									X3				
61	KABUPATEN TAPIN										X3			
62	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN									X2				
63	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH							X1						
64	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA										X2			
65	KABUPATEN TABALONG									X1				
66	KABUPATEN TANAH LAUT					X4								
67	KABUPATEN BARITO KUALA					X4								
68	KABUPATEN KOTABARU				X4									
68	KABUPATEN TANAH BUMBU											X3		
70	KABUPATEN BALANGAN										X2			

PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

TARMIZI A. KARIM

NO.	OBJEK PEMERIKSAAN APFP	JADWAL OPERASIONAL PEMERIKSAAN TAHUN 2016												KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	

BANJARMASIN

BANJARBARU

BANJAR

TAPIN

HULU SUNGAI SELATAN

HULU SUNGAI TENGAH

BANJARMASIN

BANJARBARU

BANJAR

TAPIN

HULU SUNGAI SELATAN

HULU SUNGAI TENGAH

NO.	OBJEK PEMERIKSAAN APFP	JADWAL OPERASIONAL PEMERIKSAAN TAHUN 2016												KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
	HULU SUNGAI UTARA	HULU SUNGAI UTARA												
	BALANGAN	BALANGAN												
	TABALONG	TABALONG												
	KOTABARU	KOTABARU												
	TANAH BUMBU	TANAH BUMBU												
	TANAH LAUT	TANAH LAUT												
	BARITO KUALA	BARITO KUALA												

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)

TAHUN 2014

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2014
 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2014

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

NO.	OBJEK PEMERIKSAAN APFP	JADWAL OPERASIONAL PEMERIKSAAN TAHUN 2016												KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	

H. RUDY ARIFFIN

PETA PENGAWASAN
INSPEKTORAT JENDERAL DAN INSPEKTORAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2013
DI KALIMANTAN SELATAN

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR TAHUN 2012
TANGGAL : JANUARI 2012

**PETA USULAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (UPKPT)
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2016**

NO.	KABUPATEN / KOTA	JADWAL OPERASIONAL PEMERIKSAAN TAHUN 2016												KET
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	KOTA BANJARMASIN				WIL.I									
2.	KOTA BANJARBARU					WIL.I								
3.	KABUPATEN BANJAR									WIL.III				
4.	KABUPATEN TAPIN										WIL.III			
5.	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN									WIL.II				
6.	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH						WIL.I							
7.	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA										WIL.II			
8.	KABUPATEN TABALONG									WIL.I				
9.	KABUPATEN TANAH LAUT					WIL.IV								
10.	KABUPATEN KOTABARU				WIL.IV									
11.	KABUPATEN BARITO KUALA					WIL.IV								
12.	KABUPATEN BALANGAN										WIL.II			
13.	KABUPATEN TANAH BUMBU											WIL.III		

**PETA USULAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (UPKPT)
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2015**

NO.	KABUPATEN / KOTA	JADWAL OPERASIONAL PEMERIKSAAN TAHUN 2015												KET
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1.	KOTA BANJARMASIN								PAMJAB WIL.I					
2.	KOTA BANJARBARU							PAMJAB WIL.I						
3.	KABUPATEN BANJAR							PAMJAB WIL.III						
4.	KABUPATEN TAPIN				WIL.III									
5.	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN					WIL.II								
6.	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH							PAMJAB WIL.I						
7.	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA								WIL.II					
8.	KABUPATEN TABALONG		WIL.II											
9.	KABUPATEN TANAH LAUT									WIL.IV				
10.	KABUPATEN KOTABARU							PAMJAB WIL.IV						
11.	KABUPATEN BARITO KUALA					WIL.IV								
12.	KABUPATEN BALANGAN							PAMJAB WIL.II						
13.	KABUPATEN TANAH BUMBU							PAMJAB WIL.III						

CATATAN :

OBRIK ITPROV. DI KABUPATEN/KOTA SESUAI KEBIJAKAN PENGAWASAN TAHUN 2015 :

- 1 INSPEKTORAT
- 2 **DINAS PENDIDIKAN**
- 3 **DINAS KESEHATAN**
- 4 DINAS PEKERJAAN UMUM/DRAINASE
- 5 KANTOR SATPOL PP
- 6 DINAS SOSIAL
- 7 BAGIAN PEMERINTAHAN
- 8 BAGIAN ASET (SKPD YG MENANGANI ASET)
- 9 BAPPEDA

- 10 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
- 11 **BADAN KESBANGPOL**
- 12 BPMPD

OBRIK PEMERIKSAAN BERKALA DI KABUPATEN/KOTA DILAKUKAN PADA SKPD :

- 1 BAGIAN PEMERINTAHAN tentang E-KTP (nomenklator sejenis)
- 2 BAGIAN HUKUM tentang Peraturan Perundang-undangan (nomenklator sejenis)
- 3 SEKRETARIAT DPRD tentang Peraturan Perundang-undangan (nomenklator sejenis)
- 4 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA tentang PNPM - Mandiri Perdesaan / di Kabupaten (nomenklator sejenis)
- 5 BADAN KESBANG POLINMASY. tentang desa tertinggal, terdepan (nomenklator sejenis)
- 6 BAGIAN KEUANGAN / DPPKAD tentang keuangan dan aset (nomenklator sejenis)
- 7 BAGIAN UMUM / PERLENGKAPAN tentang aset (nomenklator sejenis)
- 8 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL tentang E-KTP (nomenklator sejenis)
- 9 BAPPEDA tentang infrastruktur, pembangunan daerah dan tata ruang (nomenklator sejenis)
- 10 DINAS PEKERJAAN UMUM tentang infrastruktur, pembangunan daerah, PNPM-Mandiri Perkotaan (nomenklator sejenis)
- 11 KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU/BAGIAN PEREKONOMIAN tentang pelayanan publik, iklim investasi dan iklim usaha (nomenklator sejenis)

PETA PENGAWASAN
INSPEKTORAT PROVINSI DAN INSPEKTORAT KOTA
TAHUN 2016
DI KOTA BANJARMASIN

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2016

NO	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016												KETERANGAN
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
I SEKRETARIAT DAERAH														
1	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				X1							Y4		X1 = INSPEKTORAT PROVINSI
2	BAGIAN ORGANISASI					Y3								
3	BAGIAN HUKUM												Y4	Y1 = INSPEKTORAT KOTA WIL I
4	BAGIAN PEREKONOMIAN					Y4								Y2 = INSPEKTORAT KOTA WIL II
5	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Y1												Y3 = INSPEKTORAT KOTA WIL III
6	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT								Y2					Y4 = INSPEKTORAT KOTA WIL IV
7	BAGIAN UMUM		Y3											
8	BAGIAN KEUANGAN				X1	Y1								
9	BAGIAN DATA ELEKTRONIK								Y2					
II SEKRETARIAT DPRD														
10	SEKRETARIAT DPRD					Y2								
III DINAS-DINAS DAERAH														
11	DINAS PENDIDIKAN				Y1/X1									
12	DINAS KESEHATAN				X1					Y3				
13	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN					Y2								
14	DINAS BINA MARGA										Y3			
15	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE										Y2			
16	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA				X1			Y1						
17	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN										Y1			
18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				Y2									
19	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMATIKA											Y1		
20	DINAS PARIWISATA, SENI DAN KEBUDAYAAN					Y3								
21	DINAS PEKERJAAN UMUM/TATA RUANG				X1		Y3							
22	DINAS PENDAPATAN DAERAH									Y2				
23	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN									Y4				
24	DINAS PENGELOLA PASAR				Y3									
25	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL & MENENGAH										Y4			
26	DINAS CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN				X1				Y4					

NO	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016												KETERANGAN
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
27	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			Y1										
IV	LEMBAGA TEKNIS DAERAH													
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				X1		Y4							
29	BADAM KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT								Y3					
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				41									
31	BADAN KB, PEMBERMASY DAN PEREMPUAN												Y1	
32	BADAN LINGKUNGAN HIDUP						Y2							
33	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PM				Y2									
34	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH										Y4			
35	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN		Y1											
36	BADAN PEMBERDAYAAN MASY. DAN PEMDES				X1									
37	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				X1			Y4						
38	KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMEN							Y2						
V	KECAMATAN			Y1										
39	KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR									Y1				
40	KECAMATAN BANJARMASIN BARAT							Y2						
41	KECAMATAN BANJARMASIN UTARA											Y3		
42	KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN											Y4		
43	KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH												Y3	
VI	PERUSAHAAN DAERAH													
44	PDAM BANDARMASIN						Y3							
45	PD PAL								Y4					

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN

TARMIZI A. KARIM

PETA PENGAWASAN
INSPEKTORAT PROVINSI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN
TAHUN 2016
DI KABUPATEN TABALONG

LAMPIRAN XI
PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2016

NO	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016												KETERANGAN
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
1	SEKRETARIAT DAERAH													X1 = INSPEKTORAT PROVINSI
1	BAGIAN PEMERINTAHAN							Y1		X1				WILAYAH I
2	BAGIAN ORGANISASI							Y1						
3	BAGIAN HUKUM							Y1						Y1 = INSPEKTORAT KABUPATEN
4	BAGIAN HUMAS								Y1					WILAYAH I
5	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								Y1					Y2 = INSPEKTORAT KABUPATEN
6	BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN							Y1						WILAYAH II
7	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN								Y1					Y3 = INSPEKTORAT KABUPATEN
8	BAGIAN BINA PEMERINTAHAN DESA							Y1						WILAYAH III
II	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH													Y4 = INSPEKTORAT KABUPATEN
9	SEKRETARIAT DPRD											Y2		WILAYAH IV
III	DINAS-DINAS DAERAH													
10	DINAS PEKERJAAN UMUM							Y3		X1				
11	DINAS PENDIDIKAN							Y2		X1				
12	DINAS KESEHATAN						Y1			X1				
13	DINAS PERINDAG, KOPERASI & UKM									Y2				
14	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA								Y3	X1				
15	DINAS PERHUBUNGAN										Y4			
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL					Y3								
17	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN								Y1					
18	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN									Y4				
19	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA										Y1			
20	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL						Y3							
21	DINAS BUDPAR, PEMUDA DAN OLAH RAGA											Y4		
22	DINAS PENDAPATAN.											Y3		
22	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN									X1				
23	DINAS TATA KOTA, KEBERS. & PENGEL. PASAR						Y4							

NO	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016												KETERANGAN
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
56	UPT PKM JARO			Y4										
57	UPT PKM BINTANG ARA			Y2										
58	UPT PKM BINTANG RIBANG			Y3										
59	UPT PKM UPAU			Y1										
VI	KECAMATAN/KELURAHAN/DESA													
60	KECAMATAN JARO			Y4										
61	KECAMATAN MUARA UYA											Y1		
62	KECAMATAN HARUAI			Y3										
63	KECAMATAN BINTANG ARA			Y2										
64	KECAMATAN UPAU			Y1										
65	KECAMATAN MURUNG PUDAK											Y2		
66	KECAMATAN TANJUNG		Y1											
67	KECAMATAN TANTA		Y3											
68	KECAMATAN KELUA	Y4												
69	KECAMATAN MUARA HARUS		Y4											
70	KECAMATAN BANUA LAWAS		Y2											
71	KECAMATAN PUGAAN	Y3												
72	KELURAHAN BELIMBING RAYA											Y1		
73	KELURAHAN HIKUN				Y2									
74	KELURAHAN TANJUNG					Y1								
75	DESA												Y4	
76	KELURAHAN JANGKUNG												Y3	
77	KELURAHAN AGUNG							Y2						
78	KELURAHAN BELIMBING											Y4		
79	KELURAHAN PEMBATAAN					Y2								
80	KELURAHAN MABU'UN								Y2					
80	KELURAHAN PALAU											Y3		

PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

TARMIZI A. KARIM

PETA PENGAWASAN
INSPEKTORAT PROVINSI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN
TAHUN 2016
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2016

NO	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016												KETERANGAN
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
I	SEKRETARIAT DAERAH													
1	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN					Y3				X2				X2 = INSPEKTORAT PROPINSI
2	BAGIAN HUKUM					Y2								WILAYAH II
3	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									Y3				Y1 = INSPEKTORAT KABUPATEN
4	BAGIAN ORGANISASI									Y1				WILAYAH I
5	BAGIAN EKONOMI & PEMBANGUNAN								Y4					Y2 = INSPEKTORAT KABUPATEN
6	BAGIAN UMUM						Y3							WILAYAH II
7	BAGIAN HUMAS									Y4				Y3 = INSPEKTORAT KABUPATEN
II	SEKRETARIAT DPRD													WILAYAH III
8	SEKRETARIAT DPRD											Y4		Y4 = INSPEKTORAT KABUPATEN
III	DINAS DAERAH													WILAYAH IV
9	DINAS PEKERJAAN UMUM									X2		Y3		
10	DINAS PENDIDIKAN							Y2		X2				
11	DINAS KESEHATAN						Y4			X2				
12	DINAS PENDAPATAN PENGEL. KEU DAN ASET DAERAH									X2/Y2				
13	DINAS PERINDAGKOP DAN UKM										Y3			
14	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI											Y1		
15	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					Y4								
16	DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN								Y4					
17	DINAS PERTAN. TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA										Y2			
18	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA							Y4						
19	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						Y1							
20	DINAS KEHUTANAN & PERKEBUNAN								Y2					
21	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI							Y2		X2				
22	DINAS LH DAN TAKODES								Y1					
IV	LEMBAGA TEKNIS DAERAH													
23	INSPEKTORAT													
24	BADAN KB, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						Y1			X2				
25	BAPPEDA							Y3		X2				
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH & DIKLAT							Y3						
27	BADAN PENANGG. BENCANA, KESBANG DAN POL						Y2							
29	BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN							Y1						

NO	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016												KETERANGAN
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
65	DESA PAKUAN TIMUR	Y2												
66	DESA GUMBIL	Y2												
67	DESA MUNING DALAM				Y3									
68	DESA SUNGAI PINANG				Y3									
69	DESA TAMBANGAN			Y3										
70	DESA BANUA HANYAR			Y3										
71	DESA BATU BINI		Y3											
72	DESA MADANG	Y3												
73	DESA TABIHI	Y3												
74	DESA MAWANGI		Y3											
75	DESA SUNGAI PARING		Y4											
76	DESA AMAWANG KANAN		Y4											
77	DESA GAMBAH LUAR			Y4										
78	DESA IDA MANGGALA			Y4										
79	DESA SARANG HALANG				Y4									
80	DESA SUNGAI KALI				Y4									
81	DESA BARU	Y4												
82	DESA BAJAYAU LAMA	Y4												

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

TARMIZI A. KARIM

PETA PENGAWASAN
INSPEKTORAT PROVINSI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN
TAHUN 2016
DI KABUPATEN BALANGAN

LAMPIRAN XIV
PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2016

NO	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016												KETERANGAN
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
I	SEKRETARIAT													
1	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM											X2		X2 = INSPEKTORAT PROVINSI
2	BAGIAN ADMINISTRASI KESRA DAN KEMASYARAKATAN													WILAYAH II
3	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL													
4	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN													Y1 = INSPEKTORAT KABUPATEN
5	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN & SDA													WILAYAH I
6	BAGIAN UMUM													Y2 = INSPEKTORAT KABUPATEN
7	BAGIAN HUKUM													WILAYAH II
8	BAGIAN ORGANISASI													Y3 = INSPEKTORAT KABUPATEN
9	SEKRETARIAT DPRD													WILAYAH III
10	SEKRETARIAT DPRD						Y4							Y4 = INSPEKTORAT KABUPATEN
II	DINAS DAERAH													WILAYAH IV
11	DINAS PENDIDIKAN						Y2				X2			Y = INSPEKTORAT KABUPATEN
12	DINAS KESEHATAN						Y3				X2			WILAYAH I, II, III DAN IV
13	DINAS SOSIAL DAN NAKERTRANS							Y3			X2			
14	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								Y3					
15	DINAS PEKERJAAN UMUM							Y4			X2			
16	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI							Y1						
17	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA & KEBUDAYAAN							Y2						
18	DINAS PENDAPATAN, PENGEL. KEU. DAN ASET DAERAH						Y1				X2			
19	DINAS PERT, TP DAN HORT, PETERNAKAN DAN PERIKANAN						Y1							
20	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN						Y2							
21	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI							Y3						
22	DINAS CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN											Y2		
III	LEMBAGA TEKNIS DAERAH													
23	BAPPEDA							Y2			X2			
24	INSPEKTORAT											Y4		
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH										Y2			
26	BADAN PERBERMASY, PEMERINTAHAN DESA										Y3	X2		
27	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN						Y3							
28	BADAN PEMBER. PEREMPUAN, PERLIN. ANAK DAN KB							Y1						
29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH										Y1			
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											Y3		
31	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN										Y.4			
32	KANTOR PERPUST. , DOKUMENTASI DAN ARSIP DAERAH							Y4						

NO	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016												KETERANGAN
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
73	DESA MURUNG ABUIN					Y2								
74	DESA MURUNG JAMBU												Y2	
75	DESA HALABAU												Y2	
76	DESA TEBING TINGGI				Y3									
77	DESA SUNGSUM				Y3									
78	DESA JUUH				Y3									
79	DESA PITAP				Y3									
80	DESA KAMBIYAIN												Y3	
81	DESA AJUNG												Y3	
82	DESA PANAITAN					Y3								
83	DESA MUNDAR					Y3								
84	DESA KUPANG					Y3								
85	DESA TAMPANG					Y3								
86	DESA JINAMUN												Y3	
87	DESA PIMPING												Y3	
88	DESA BARU				Y4									
89	DESA AWAYAN HILIR				Y4									
90	DESA PIYAIT				Y4									
91	DESA AMBAKIANG				Y4									
92	DESA SUNGAI PUMPUNG												Y4	
93	DESA KEDONDONG												Y4	
94	DESA BABAYAU					Y4								
95	DESA PARAN					Y4								
96	DESA KALAHIAN					Y4								
97	DESA HUJAN MAS					Y4								
98	DESA LOK BATUNG												Y4	
99	DESA BALIDA												Y4	
VI	PENINGK. KINERJA PELAK. TUGAS DAN FUNGSI SKPD													
100	PEMERIKSAAN PENUTUPAN KAS & BKU DAN OPNAME PESED.	Y												
101	EVALUASI LKjIP DAN PRA REVIU LKPD		Y											
102	REVIU LKjIP DAN REVIU LKPD			Y										
103	REVIU RKA SKPD DAN RKA PPKD											Y		

PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

TARMIZI A. KARIM

PETA PENGAWASAN
INSPEKTORAT PROVINSI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN
TAHUN 2016
DI KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2016

NO	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016												KETERANGAN		
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES			
I	SEKRETARIAT DAERAH								Y 4							
1	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN															X3
2	BAGIAN HUKUM															X3 = INSPEKTORAT PROVINSI
3	BAGIAN HUMAS															IRBAN WILAYAH III
4	BAGIAN EKONOMI DAN PENANAMAN MODAL															Y1 = INSPEKTORAT KABUPATEN
5	BAGIAN PEMBANGUNAN DAN KESRA															IRBAN WILAYAH I
6	BAGIAN TATA USAHA															Y2 = INSPEKTORAT KABUPATEN
7	BAGIAN ORGANISASI															IRBAN WILAYAH II
8	BAGIAN UMUM															Y3 = INSPEKTORAT KABUPATEN
9	BAGIAN KESRA															IRBAN WILAYAH III
II	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH															Y4 = INSPEKTORAT KABUPATEN
10	SEKRETARIAT DPRD								Y4							IRBAN WILAYAH IV
III	DINAS-DINAS DAERAH															
11	DINAS BINA MARGA DAN SDA									Y1						
12	DINAS PENDIDIKAN													Y3		
13	DINAS KESEHATAN									Y2						
14	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN															
15	DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI															
16	DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI															
17	DINAS PERTANIAN , PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN									Y2						
18	DINAS PERHUBUNGAN, KOMINFO															Y1
19	DINAS KEHUTANAN									Y2						
20	DINAS PERIKANAN & KELAUTAN									Y3						
21	DINAS SOSIAL									Y4						
22	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL															
23	DINAS PENDAPATAN															Y4
24	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OR															Y3
25	DINAS KOPERASI DAN UKM															Y3
26	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN									Y1						X3
IV	LEMBAGA TEKNIS DAERAH															
27	INSPEKTORAT															
28	BAPPEDA								Y3							X3
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH															Y2

PDTT

NO	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016											KETERANGAN			
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP		DES		
30	BADAN KESBANG DAN POLITIK							Y3								
31	BADAN LINGKUNGAN HIDUP											Y3				
32	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES											X3		Y4		
33	BP3AKB											Y1				
34	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN											Y1				
35	B K P M T 2 T							Y3								
36	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									Y1						
37	BPKAD											X3			Y2	
38	KANTOR KETAHANAN PANGAN														Y1	
39	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP							Y2								
40	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA											X3-Y4				
41	RSU RATU ZALEHA													Y4		
42	SEKRETARIAT KORPRI													Y1		
V	KECAMATAN/KELURAHAN															
43	KECAMATAN SUNGAI PINANG				Y1											
44	KECAMATAN PENGARON				Y1											
45	KECAMATAN SIMPANG EMPAT					Y1										
46	KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR					Y2										
47	KECAMATAN ASTAMBUL				Y3											
48	KECAMATAN PARAMASAN		Y3													
49	KECAMATAN BERUNTUNG BARU					Y4										
50	KECAMATAN ALUH-ALUH					Y4										
51	KECAMATAN TATAH MAKMUR						Y4									
52	KECAMATAN MARTAPURA TIMUR					Y1										
53	KECAMATAN KERTAK HANYAR						Y1									
54	KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG				Y2											
55	KECAMATAN MARTAPURA KOTA					Y2										
56	KECAMATAN GAMBUT						Y2									
57	KECAMATAN ARANIO					Y3										
58	KECAMATAN KARANG INTAN					Y3										
59	KECAMATAN CINTAPURI DARUSSALAM				Y3											
60	KECAMATAN SUNGAI TABUK				Y4											
61	KECAMATAN MARTAPURA BARAT				Y4											
62	KECAMATAN MATARAMAN				Y2											
63	KELURAHAN KERATON			Y1												
64	KELURAHAN PESAYANGAN			Y1												

PDTT

NO	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016											KETERANGAN		
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP		DES	
65	KELURAHAN SEKUMPUL			Y3											
66	KELURAHAN SUNGAI LULUT			Y1											
67	KELURAHAN KERTAK HANYAR			Y2											
68	KELURAHAN MANARAP			Y2											
69	KELURAHAN MANDAR SARI			Y2											
70	KELURAHAN JAWA			Y3											
71	KELURAHAN TANJUNG REMA			Y3											
72	KELURAHAN MURUNG KERATON			Y3											
73	KELURAHAN SUNGAI PARING			Y4											
74	KELURAHAN GAMBUT			Y4											
75	KELURAHAN GAMBUT BARAT			Y4											
VI	PUSKESMAS														
76	PUSKESMAS BERUNTUNG BARU		Y1												
77	PUSKESMAS ALUH-ALUH		Y1												
78	PUSKESMAS GAMBUT		Y1												
79	PUSKESMAS SUNGAI PINANG	Y2													
80	PUSKESMAS PENGARON	Y2													
81	PUSKESMAS PASAYANGAN	Y2													
82	PUSKESMAS SUNGKAI	Y3													
83	PUSKESMAS SIMPANG EMPAT	Y3													
84	PUSKESMAS LOK BAINAN	Y4													
85	PUSKESMAS SUNGAI TABUK	Y4													
86	PUSKESMAS SUNGAI LULUT		Y4												
87	PUSKESMAS KERTAK HANYAR	Y1													
88	PUSKESMAS MARTAPURA TIMUR	Y1													
89	PUSKESMAS ASTAMBUL	Y1													
90	PUSKESMAS KARANG INTAN		Y2												
91	PUSKESMAS SUNGAI ALANG		Y2												
92	PUSKESMAS ARANIO		Y2												
93	PUSKESMAS SAMBUNG MAKMUR	Y3													
94	PUSKESMAS BAWAHAN SELAN		Y3												
95	PUSKESMAS SUNGAI RANGAS		Y4												
96	PUSKESMAS TATAH PEMANGKIH LAUT		Y4												
97	PUSKESMAS MARTAPURA	Y4													
98	PUSKESMAS PARAMASAN		Y3												

PDTT

PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

TARMIZI A. KARIM

PETA PENGAWASAN
INSPEKTORAT PROVINSI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN
TAHUN 2016
DI KABUPATEN TAPIN

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2016

NO	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016												KETERANGAN						
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES							
I	SEKRETARIAT	PENDAMPINGAN LAPORAN KEUANGAN DESA	REVU LAPORAN KEUANGAN DAERAH	EVALUASI LAKIP																
1	BAGIAN PEMERINTAHAN											Y2	X3						X3 = INSPEKTORAT PROVINSI IRBAN WILAYAH III	
2	BAGIAN HUKUM																			
3	BAGIAN HUMAS											Y2								
4	BAGIAN ORGANISASI																Y4			Y1 = INSPEKTORAT KABUPATEN IRBAN WILAYAH I
5	BAGIAN PERLENGKAPAN																Y3			
6	BAGIAN UMUM																Y1			Y2 = INSPEKTORAT KABUPATEN IRBAN WILAYAH II
7	BAGIAN KESRA																Y4			
8	BAGIAN PENANAMAN MODAL																Y1			Y3 = INSPEKTORAT KABUPATEN IRBAN WILAYAH III
II	SEKRETARIAT DPRD																			
9	SEKRETARIAT DPRD																		Y2	Y4 = INSPEKTORAT KABUPATEN IRBAN WILAYAH IV
III	DINAS DAERAH																			
10	DINAS PENDIDIKAN																X3-Y2			
11	DINAS KESEHATAN																Y3	X3		
12	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, BUDPAR																Y4			
13	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																Y2			
14	DINAS PEKERJAAN UMUM																		Y1	
15	DINAS PERINDAG, KOPERASI DAN UKM																Y4			
16	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI																		Y2	
17	DINAS PENDAPATAN, PENGEL. KEU. DAN ASET DAERAH																	X3-Y4		
18	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN																	Y1		
19	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN																Y2			
20	DINAS PENGELOLAAN PASAR																	Y3		
21	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA																	Y3		
22	DINAS TATA KOTA DAN KEBERSIHAN																	X3-Y4		
23	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA																	Y3		
24	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL																	X3		
IV	LEMBAGA TEKNIS DAERAH																			
25	BAPPEDA																	X3	Y1	
26	INSPEKTORAT																			
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																Y4			
28	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES																	X3	Y2	
29	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB																Y4			
30	BADAN LINGKUNGAN HIDUP																	Y1		
31	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKS. PENYULUHAN															Y3				
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH														Y2					
33	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU															Y3				
34	KANTOR KESBANG DAN POLITIK														Y2					

NO	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016												KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
35	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH									Y1				
36	KANTOR SATPOL PP									Y1	X3			
37	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL									Y3				
38	SEKRETARIAT KORPRI								Y4					
39	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH										Y4			
V	KECAMATAN/DESA/UPT/PUSKESMAS													
40	KECAMATAN HATUNGUN									Y1				
41	KECAMATAN TAPIN UTARA									Y1				
42	KECAMATAN BUNGUR								Y4					
43	KECAMATAN CANDI LARAS UTARA								Y2					
44	KECAMATAN TAPIN SELATAN								Y2					
45	KECAMATAN SALAM BABARIS								Y4					
46	KECAMATAN PIANI								Y4					
47	KECAMATAN BAKARANGAN							Y2						
48	KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN								Y3					
49	KECAMATAN LOKPAIKAT								Y3					
50	KECAMATAN BINUANG								Y1					
51	KECAMATAN TAPIN TENGAH								Y3					
52	DESA JINGAH BABARIS								Y1					
53	DESA BADAUN								Y2					
54	DESA KAKARAN								Y3					
55	DESA LUMBU RAYA								Y4					
56	DESA CEMPAKA													
57	DESA BARINGIN A													
58	DESA BARINGIN B													
59	DESA PARIOK													
60	DESA BATALAS													
61	DESA TALUK HAUR													
62	DESA TANGKAWANG BARU													
63	DESA BAULIN													
64	DESA BATARATAT													
65	DESA BUDI MULYA													
66	DESA PEMATANG KARANGAN HILIR													
67	DESA KEMBANG KUNING													
68	DESA ASAM RANDAH									Y1				
69	DESA BATU HAPU									Y1				
70	DESA HATUNGUN									Y1				
71	DESA TANDUI									Y2				
72	DESA TIMBAAN									Y2				
73	DESA BUNDUNG									Y2				
74	DESA MASTA									Y2				
75	DESA PANDAHAN									Y3				
76	DESA PANTAI CABE									Y4				

PENDAMPINGAN LAPORAN KEUANGAN DESA

REVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH

EVALUASI LAKIP

NO	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016												KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
77	DESA TUNGKAP						Y1							
78	DESA GUNUNG BATU						Y1							
79	DESA PADANG SARI						Y1							
80	DESA MEKAR SARI						Y1							
81	DESA TANGKAWANG						Y2							
82	DESA WARINGIN						Y2							
83	DESA GADUNG KERAMAT						Y2							
84	DESA BAKARANGAN						Y2							
85	DESA MANDURIAN						Y3							
86	DESA PEBAUNGHILIR						Y3							
87	DESA PARANDAKAN						Y3							
88	DESA BITAHAN BARU						Y3							
89	DESA SUATO LAMA						Y4							
90	DESA SUATO BARU						Y4							
91	DESA KAMBANG HABANG LAMA						Y4							
92	DESA KAMBANG HABANG BARU						Y4							
93	DESA PARIGI KACIL							Y2						
94	DESA PARIGI							Y2						
95	DESA KETAPANG							Y2						
96	DESA PEMATANG KARANGAN							Y3						
97	DESA PEMATANG KARANGAN HULU							Y3						
98	DESA ANDIKA							Y3						
99	DESA LINUH							Y4						
100	DESA KALUMPANG							Y4						
101	DESA BUNGUR							Y4						
102	DESA BUNGUR BARU							Y4						
103	DESA TIIRIK								Y3					
104	DESA MARGASARI HULU											Y3		
105	PUSKESMAS HATUNGUN							Y1						
106	PUSKESMAS BINUANG							Y1						
107	PUSKESMAS TAPIN UTARA							Y1						
108	PUSKESMAS CANDI LARAS UTARA								Y2					
109	PUSKESMAS TAPIN SELATAN								Y2					
110	PUSKESMAS BAKARANGAN								Y2					
111	PUSKESMAS LOKPAIKAT						Y3							
112	PUSKESMAS TAPIN TENGAH						Y3							
113	PUSKESMAS CLS MARGASARI						Y3							
114	PUSKESMAS PIANI						Y4							
115	PUSKESMAS BUNGUR						Y4							
116	PUSKESMAS SALAM BABARIS						Y4							
VI	SDN/SMPN													
117	SDN PERINTIS RAYA		Y1											
118	SDN BANUA HALAT KANAN		Y1											

PENDAMPINGAN LAPORAN KEUANGAN DESA

REVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH

EVALUASI LAKIP

NO	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016												KETERANGAN	
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES		
119	SDN RANTAU KANAN 1		Y1												
120	SDN ANTASARI HILIR		Y1												
121	SDN RANGDA MALINGKUNG 5		Y1												
122	SDN SUATO TATAKAN 2		Y2												
123	SDN RUMINTIN 3		Y2												
124	SDN TANDUI 2		Y2												
125	SDN TAMBARANGAN 1		Y2												
126	SDN TAMBARANGAN 3		Y2												
127	SDN KEPAYANG		Y3												
128	SDN PANDULANGAN 2		Y3												
129	SDN PEMATANG KARANGAN		Y3												
130	SDN BITAHAN 2		Y3												
131	SDN LOKPAIKAT 1		Y3												
132	SDN SALAM BABARIS 3		Y4												
133	SDN SALAM BABARIS 4		Y4												
134	SDN SUATO 3		Y4												
135	SDN KEMBANG HABANG 2		Y4												
136	SDN BAGAK			Y1											
137	SDN ASAM RANDAH			Y1											
138	SDN TARUNGIN 2			Y1											
139	SDN BURAKAI			Y1											
140	SDN BATU HAPU 2			Y1											
141	SDN TATAKAN 1			Y2											
142	SDN HARAPAN MASA 1			Y2											
143	SDN RUMINTIN 1			Y2											
144	SDN TANDUI 1			Y2											
145	SDN LOKPAIKAT 3			Y3											
146	SDN MARAMPIAU			Y3											
147	SDN SHABAH			Y4											
148	SDN KALUMPANG 1			Y4											
149	SDN KALUMPANG 2			Y4											
150	SDN RANTAU BUJUR 1			Y4											
151	SDN RANTAU BUJUR 2			Y4											
152	SDN BINUANG 2								Y1						
153	SDN BINUANG 3								Y1						
154	SDN BINUANG 1								Y1						
155	SDN PIPITAK JAYA 1							Y4							
156	SDN MIAWA							Y4							
157	SDN BATU AMPAR							Y4							
158	SDN BARAMBAN							Y4							
159	SDN BALAWAIAN							Y4							

PENDAMPINGAN LAPORAN KEUANGAN DESA

REVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH

EVALUASI LAKIP

PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

TARMIZI A. KARIM

PETA PENGAWASAN
INSPEKTORAT PROVINSI DAN INSPEKTORAT KABUPATEN
TAHUN 2016
DI KABUPATEN TANAH BUMBU

LAMPIRAN XIII
PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2016

No.	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016												KETERANGAN
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
I	SEKRETARIAT DAERAH													
1	BAGIAN PEMERINTAHAN							Y3					X3	X3 = INSPEKTORAT PROVINSI
2	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT							Y1						IRBAN WILAYAH III
3	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT											Y4		
4	BAGIAN PEREKONOMIAN							Y3						Y1 = INSPEKTORAT KABUPATEN
5	BAGIAN ORGANISASI							Y4						IRBAN WILAYAH I
6	BAGIAN HUKUM											Y2		Y2 = INSPEKTORAT KABUPATEN
7	BAGIAN UMUM											Y2		IRBAN WILAYAH II
8	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN											Y3		Y3 = INSPEKTORAT KABUPATEN
II	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH													IRBAN WILAYAH III
9	SEKRETARIAT DPRD							Y2						Y4 = INSPEKTORAT KABUPATEN
III	DINAS-DINAS DAERAH													IRBAN WILAYAH IV
3	DINAS PEKERJAAN UMUM											Y3		
4	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN									Y2				
5	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN											Y1		
6	DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN											X3-Y2		
7	DINAS KELAUTAN & PERIKANAN									Y1				
8	DINAS KESEHATAN							Y1					X3	
9	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA									Y4				
10	DINAS PENDAPATAN												Y2	
11	DINAS PERINDAG, KOPERASI DAN UKM									Y3				
12	DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI												Y4	
13	DINAS PENDIDIKAN											Y4	X3	
14	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN									Y3				
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL							Y3						
16	DINAS PERHUBUNGAN DAN INFORMATIKA											Y2		
17	DINAS PASAR												Y1	

No.	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016												KETERANGAN
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
IV	LEMBAGA TEKNIS DAERAH													
18	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH							Y3						
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH								Y2					
20	BADAN PEMBERMASY. DAN PEMERINTAHAN DESA							Y1						
21	BADAN KB, PEMBERDAYAAN PEREMP. PERLIND. ANAK							Y4						
22	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH								Y4					
23	BADAN PELAYANAN PERIZINAN & PENANAMAN MODAL										Y3			
24	BADAN PELAK. PENYUL. PERTAN. PERIK. KEHUT.									Y1				
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH											Y1		
26	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH												Y4	
27	INSPEKTORAT													
28	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							Y4						
29	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH					Y2								
30	KANTOR KETAHANAN PANGAN									Y1				
31	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PM					Y1								
32	SEKRETARIAT KORPRI									Y4				
33	RSUD DR H ANDI ABDURRAHMAN NOOR												Y3	
V	KECAMATAN													
34	KEC. SATUI							Y2						
35	KEC. KUSAN HULU									Y2				
36	KEC. SEI. LOBAN									Y3				
37	KEC. KARANG BINTANG										Y1			
38	KEC. KUSAN HILIR								Y1					
39	KEC. SIMPANG EMPAT								Y3					
40	KEC. ANGSANA						Y4							
41	KEC. MENTEWE								Y4					
42	KEC. KURANJI										Y3			
44	KEC. BATU LICIN								Y2					
VI	KELURAHAN													
45	KELURAHAN PAGATAN					Y3								
46	KELURAHAN TUNGKARAN PANGERAN						Y2							
47	KELURAHAN BATULICIN											Y1		
48	KELURAHAN GUNUNG TINGGI						Y1							
49	KELURAHAN KAMPUNG BARU						Y2							

No.	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016												KETERANGAN
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
VII	KEGIATAN LAIN-LAIN													
50	AUDIT PAD TAHUN 2015	Y1.Y2. Y3.Y4												
51	PEMER. DANA BOS, HIBAH & BANSOS THN 2015		Y1.Y2. Y3.Y4											
52	REVIEW LKPD			Y1.Y2. Y3.Y4										
53	MONEV PENGELOLAAN DANA DAD TAHUN 2015				Y1.Y2. Y3.Y4									
54	EVALUASI LAKIP SKPD					Y1.Y2. Y3.Y4								

PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

TARMIZI A. KARIM

NO	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016												KETERANGAN
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
53	DESA WILAYAH KECAMATAN TAKISUNG				Y1									
54	DESA WILAYAH KECAMATAN JORONG	Y2												
55	DESA/KELURAHAN WILAYAH KECAMATAN PELAIHARI					Y4								
56	DESA WILAYAH KECAMATAN TAMBANG ULANG	Y1												
57	DESA WILAYAH KECAMATAN PANYIPATAN					Y3								
58	DESA WILAYAH KECAMATAN KURAU		Y2											
59	DESA WILAYAH KECAMATAN BAJUIN						Y2							
60	DESA WILAYAH KECAMATAN BUMI MAKMUR		Y4											
61	KELURAHAN PELAIHARI												Y3	
62	KELURAHAN SARANG HALANG											Y3		
63	KELURAHAN PABAHANAN												Y2	
64	KELURAHAN ANGSAU												Y1	
65	KELURAHAN KARANG TARUNA												Y1	

PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

TARMIZI A. KARIM

NO	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016												KETERANGAN
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	



NO	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016												KETERANGAN		
		JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES			
27	BADAN LINGKUNGAN HIDUP															
28	BADAN KB, PEMBERD. PEREMPUAN DAN PELIND. ANAK												Y1			
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH													Y3		
30	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN									Y3						
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						X4	Y3								
32	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA															
33	KANTOR PELAYANAN TERPADU															
34	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH															
35	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						X4									
36	RSUD H. ABDUL AZIS												Y2			
V	KECAMATAN DAN DESA															
37	6 DESA DI KECAMATAN ALALAK								Y1							
38	DANA BOS DI KECAMATAN ALALAK									Y2						
39	6 DESA DI KECAMATAN WANARAYA							Y1								
40	6 DESA DI KECAMATAN KURIPAN							Y1								
41	6 DESA DI KECAMATAN BELAWANG					Y1										
42	6 DESA DI KECAMATAN TABUNGANEN								Y3							
43	6 DESA DI KECAMATAN RANTAU BADAUH										Y2					
44	6 DESA DIKECAMATAN ANJIR MUARA									Y2						
45	6 DESA DIKECAMATAN ANJIR PASAR							Y2								
46	6 DESA DIKECAMATAN MEKAR SARI					Y2										
47	6 DESA DIKECAMATAN BAKUMPAI						Y3									
48	KECAMATAN BARAMBAI														Y3	
49	6 DESA DIKECAMATAM BARAMBAI					Y3										
50	KECAMATAN MARABAHAN														Y3	
51	6 DESA DI KECAMATAN MARABAHAN					Y3										
52	6 DESA DI KECAMATAN TABUKAN						Y1									
53	6 DESA DI KECAMATAN CERBON												Y2			
54	6 DESA DI KECAMATAN TAMBAN					Y2										
55	DANA BOS DI KECAMATAN TAMBAN							Y2								
56	6 DESA DI KECAMATAN JEJANGKIT												Y3			

NO	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016												KETERANGAN			
		JAN	PEB	MAR	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES				
VI	PENINGK. KINERJA PELAK. TUGAS DAN FUNGSI SKPD																
57	REVIU LKPD DAN LK SKPD TAHUN 2015		Y														
58	REVIU RKA SKPD												Y				
59	EVALUASI LAKIP SKPD			Y													
60	MANAJEMEN KAS TAHUN ANGGARAN 2016															Y	
61	MANAJEMEN ASET	Y															

PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

TARMIZI A. KARIM

PETA PENGAWASAN
INSPEKTORAT KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2016
DI KABUPATEN KOTABARU

LAMPIRAN XII
PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2016
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2016

NO	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016												KETERANGAN
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
I	SEKRETARIAT DAERAH													
1	BAGIAN TATA USAHA								Y					
2	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				X4				Y					X4 = INSPEKTORAT PROVINSI
3	BAGIAN HUKUM DAN HAM								Y					WILAYAH IV
4	BAGIAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH								Y					
5	BAGIAN PEREKONOMIAN								Y					Y1 = INSPEKTORAT KABUPATEN
6	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								Y					WILAYAH I
7	BAGIAN PERTANAHAN								Y					Y2 = INSPEKTORAT KABUPATEN
8	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL								Y					WILAYAH II
9	BAGIAN KEUANGAN								Y					Y3 = INSPEKTORAT KABUPATEN
10	BAGIAN UMUM								Y					WILAYAH III
II	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH													Y4 = INSPEKTORAT KABUPATEN
11	SEKRETARIAT DPRD						Y3							WILAYAH IV
III	DINAS-DINAS DAERAH													Y = INSPEKTORAT KABUPATEN
12	DINAS PENDIDIKAN SERTA SATUAN PENDIDIKAN				X4						Y			WILAYAH I, II, III, IV
13	DINAS KESEHATAN SERTA UPT				X4					Y				
14	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR							Y1						
15	DINAS CIPTA KARYA, PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN				X4				Y1					
16	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							Y1						
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								Y3					
18	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				X4			Y3						
19	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN						Y4							
20	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA					Y1								
21	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI							Y2						
22	DINAS PENDAPATAN DAERAH					Y1								
23	DINAS PERTANIAN							Y3						
24	DINAS PETERNAKAN			Y1										
25	DINAS PERKEBUNAN					Y2								
26	DINAS KEHUTANAN						Y2							
27	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN							Y3						
28	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							Y2						
29	DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR											Y4		

NO	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016												KETERANGAN
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
IV	LEMBAGA TEKNIS DAERAH													
30	INSPEKTORAT													
31	BAPPEDA				X4			Y4						
32	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						Y1							
33	BADAN KB, PERBER. PEREMP. PELIND. ANAK						Y2							
34	BADAN PEMBERDAYAAN MASY. DAN PEMDES				X4			Y4						
35	BADAN KESBANG DAN POLITIK							Y2						
36	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH						Y4							
37	BADAN KETAH. PANG & PELAKS. PENYUL. TAN, KAN, HUT						Y3							
38	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						Y3							
39	BADAN PENGEL. KEUANGAN DAN ASET DAERAH				X4			Y4						
40	BADAN PELAYANAN IZIN TERPADU DAN PM						Y4							
41	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH						Y1							
42	SATPOL PP				X4/Y1									
43	SEKRETARIAT KORPRI								Y4					
44	SEKRETARIAT KPU						Y2							
45	RSUD KOTABARU								Y3					
46	PDAM						Y4							
V	KECAMATAN													
47	KECAMATAN HAMPANG				Y3									
48	KECAMATAN KELUMPANG BARAT				Y3									
49	KECAMATAN KELUMPANG HULU				Y4									
50	KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN				Y4									
51	KECAMATAN PULAU LAUT TIMUR				Y1									
52	KECAMATAN PULAU LAUT KEPULAUAN				Y1									
53	KECAMATAN PULAU LAUT UTARA				Y2									
54	KECAMATAN PULAU SEBUKU				Y2									
55	KECAMATAN PULAU LAUT BARAT					Y3								
56	KECAMATAN KELUMPANG UTARA					Y3								
57	KECAMATAN KELUMPANG HILIR				Y1									
58	KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH					Y4								
59	P					Y4								
60	KECAMATAN SAMPAHANAN					Y1								
61	KECAMATAN KELUMPANG TENGAH					Y2								
62	KECAMATAN PAMUKAN BARAT					Y2								
63	KECAMATAN KELUMPANG SELATAN						Y3							
64	KECAMATAN PAMUKAN UTARA					Y1								
65	KECAMATAN PULAU SEMBILAN					Y2								

NO	OBYEK PEMERIKSAAN	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2016												KETERANGAN
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	
66	KECAMATAN SUNGAI DURIAN				Y4									
67	KECAMATAN P.L. TG. SELAYAR				Y3									
VII	REVIU, MONEV DAN LAINNYA													
68	MONITORING DAN EVALUASI					Y	Y							
69	EVALUASI LAPORAN KINERJA SKPD			Y	Y	Y								
70	REVIU LKPD	Y	Y	Y									Y	
71	REVIU LAPORAN KINERJA PEMDA			Y										
72	REVIU RKA-SKPD							Y	Y	Y				
73	PEMERINTAHAN DESA											Y	Y	

PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

TARMIZI A. KARIM